NEWSLETTER TRIWULAN III
Periode Juli – September 2022 **Edisi 35**

Kementerian PPN/ Bappenas

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

ICCTFNEWS

Supporting the Indonesian Government for a Better Climate

Kemajuan Capaian **COREMAP-CTI ADB**

Cover foto: (Foto: Dok.ICCTF)

PENGANTAR REDAKSI

Salam Lestari,

Di pertengahan tahun ini kami senang melihat perkembangan program COREMAP-CTI ADB, sangat dinamis, dan satu persatu kegiatannya sudah banyak yang selesai. Terutama dalam hal meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di *site project* kami seperti di Nusa Penida, Bali, dan Lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat). Kami juga melihat langsung kesungguhan para pemangku kebijakan yang terbuka dan berkomitmen untuk bisa melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh.

Kami juga antusias karena beberapa mitra kami sudah mulai membangun infrastruktur seperti Pusat Informasi Ekowisata, Jalur mangrove, dan menara pengawas. Kami merasa optimis, semua proses dan kemajuan yang ada di lapangan akan selesai pada waktunya (akhir tahun ini), dan kami mengapresiasi kerja keras para mitra pelaksana kami yang mengawal di lapangan dengan baik. Kami juga berharap pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan, bisa selesai pada waktunya dan bisa segera dimanfaatkan oleh stakeholder, dan masyarakat.

Dalam kegiatan lainnya kami ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam side event G20. Dalam event ini kita jadi mengetahui beberapa negara, seperti Amerika, Australia, bahkan beberapa negara berkembang seperti Indonesia, sudah memprioritaskan pembangunan ekonomi birunya dengan serius. Terutama dalam hal mengelola ekosistem karbon biru. Jadi tidak ada alasan untuk Indonesia tidak melakukannya apalagi ekosistem karbon biru kita termasuk terbesar di dunia dan pastinya kontribusi penyerapan karbonnya tinggi.

Lebih dari itu, semoga menikmati bacaan Newsletter Ketiga kami di tahun 2022 ini.

Salam Lestari,

Tonny Wagey

(Direktur Eksekutif ICCTF)

DISCLAIMER:

Artikel dalam Newsletter ini dibuat dan dikelola langsung oleh Tim Komunikasi ICCTF. jika ada kesalahan dalam penulisan pada konten media ini, merupakan tanggungjawab sepenuhnya penulis. Karena Newsletter ini disusun dalam format pdf yang dipasang secara online melalui website maka jika ada revisi yang dilakukan berdasarkan koreksi akan langsung dilakukan.

Segala isi dari konten ini baik bentuk visual dan artikel merupakan hak cipta ICCTF. Jika ada yang ingin mengutip sebagian atau seluruhnya, diharuskan untuk meminta ijin kepada ICCTF.

KONTAK REDAKSI

Gedung Lippo Kuningan, 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Telepon : (021) 80679386
Email : Sekretariat@icctf.or.id

SOSIAL MEDIA ICCTF

www.icctf.or.id
ICCTFofficial
Indonesia Climate Change Trust Fund
ICCTF_ID

1

Para panelis dan narasumber dalam kegiatan ini usai perhelatan diskusi. (Foto: Dok/ICCTF)

G20 *Side Event Seminar "Blue Carbon," Enabling Conservation and Financial Capital* di Bali

Ekosistem Karbon Biru Indonesia Sudah Saatnya Menjadi Prioritas

Nusa Dua, Badung, Bali- Sudah saatnya ekosistem Karbon Biru (*Blue Carbon)* menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata kelola ruang dan konservasi pesisir di Indonesia maupun global. Apalagi mangrove dan padang lamun dapat menyerap dan menyimpan karbon alami (*carbon sink*) yang sangat besar dalam waktu yang sangat lama, bahkan lebih banyak dari hutan terestrial.

Hal ini ditandaskan Arifin Ruditanto, Perencana Ahli Utama Untuk Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, dalam sambutannya membuka Seminar *"Blue Carbon," Enabling Conservation and Finansial Capital,* dalam G20 Side Event, 8 Agustus 2022, di Nusa Dua, Bali. Arifin juga didampingi langsung Jiro Tominaga, *Country Director Asian Development Bank* (ADB), yang juga menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.

Selain itu juga hadir para narasumber lainnya yang berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem karbon biru dan model pembiayaannya. Antara lain, dari *Counsellor Development Effectiveness and Sustainability* Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Simon Ernst, *Deputy Country Director Agence Francaise de Developpement* (AFD) untuk Indonesia Sophie Chappellet, serta Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf. Diskusi dan seminar tersebut dipandu Direktur Eksekutif Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Tonny Wagey.

Sebagai catatan, luas padang lamun di Indonesia termasuk terluas di dunia hingga 293.465-875.957 Ha, dan mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton karbon

per hektar. Begitu pun dengan mangrove Indonesia yang seluas 3,3 juta Ha adalah terbesar di dunia, dan mampu menyimpan karbon sebanyak 950 ton karbon per hektarnya. Namun luas padang lamun di Indonesia, menurut hasil kajian Pusat Riset Oseanografi Indonesia *dalam Buku Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021* disebutkan ekosistem ini mengalami penurunan sebesar 2,8% per tahun atau sekitar 0,4 ha per tahun pada periode 2015-2021. Sementara mangrove Indonesia, dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) menyebutkan kurang lebih seluas 637.824,31 Ha (19,28%) berada pada kondisi kritis.

"Ke depan, kita ingin memastikan ekosistem Karbon Biru bisa masuk NDC (*Nationally Determined Contribution*). Tentu saja harus melalui perencanaan pembangunan Karbon Biru yang berkelanjutan, dan harus didukung komitmen semua pihak. Untuk mencapai ini diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat mengakomodasi semua pihak," jelasnya.

Dia juga menambahkan jika ekosistem Karbon Biru di tata dan dikelola dengan baik secara strategis untuk adaptasi dan mitigasi menuju ketahanan iklim, maka Indonesia juga bisa berkontribusi lebih banyak dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara nasional, dan 41% secara global hingga tahun 2030. Artinya Indonesia juga berpacu dalam menjaga, melindungi, sekaligus merehabilitasi ekosistem Karbon Biru Indonesia yang juga semakin terdegradasi.

Karena itu menurut Arifin diperlukan dokumen kebijakan sebagai dasar hukum dan payung manajemen Karbon Biru Indonesia. Artinya Indonesia membutuhkan banyak pendanaan dari pinjaman atau pun hibah serta sumber keuangan lainnya yang inovatif. Misalnya dengan menjual kredit karbon yang nanti juga diperuntukan untuk membiayai pembangunan Indonesia di sektor lainnya. Misalnya untuk pengembangan sektor energi terbarukan, ekowisata, dan tentu saja kelautan dan perikanan.

Sementara itu Jiro Tominaga menandaskan, ADB sangat peduli dalam mendorong upaya mitigasi krisis iklim dengan salah satunya melakukan konservasi ekosistem karbon biru dalam hal ini mangrove dan padang lamun. Terlebih Indonesia yang memiliki mangrove dan padang luas yang termasuk terluas di dunia, sehingga menjadi strategis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasinya terhadap perubahan iklim.

Jiro Tominaga, Country Director Asian Development Bank (ADB), menjadi pembicara kunci dalam kegiatan seminar ini. (Foto: Dok/ICCTF)

Upaya mendukung dan mempromosikan ekonomi biru dalam menciptakan peluang bagi sektor swasta berinvestasi dalam pembangunan sektor ini selalu di lakukan oleh ADB tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke negara-negara berkembang yang menjadi anggota ADB ini.

Jiro juga menambahkan bahkan ADB telah melakukan investasi dan memobilisasi anggotanya untuk *carbon trader* yang telah diluncurkan pada COP26 2021 Glasgow. Melalui *Blue Sea Finance Hub*, ADB akan meluaskan program tersebut dan berharap dukungannya untuk mangrove dan padang lamun di Indonesia juga bisa meningkatkan pertukaran kredit karbon.

Diskusi ini dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey (berdiri), dan mendapatkan pembelajaran yang baik dari negara lain tentang pengelolaan bahkan pendanaan konservasi ekosistem Karbon Biru. (Foto: Dok/ICCTF)

Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Seperti halnya ADB*, Deputy Country Director* AFD untuk Indonesia, Sophie Chappelet menyampaikan dukungannya untuk Indonesia dalam pengelolaan sektor ini, dengan mengintegrasikannya ke dalam Kebijakan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim di Indonesia. Dia juga menceritakan contoh sukses yang dilakukan AFD ketika memberikan dukungan inisiatif dalam Kiwa Project yang dilakukan di Fiji, Samoa, dan Timor Leste, pada 2020. Program ini juga mengupayakan restorasi, dan meningkatkan pengeloaan ekosistem untuk melindungi pesisir. AFD bahkan mempunyai pengalaman mendanai 14 proyek karbon biru di Cina, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Termasuk lokasi di proyek Kiwa yang disebut. Apalagi potensi Indonesia besar, mengacu pada studi Bank Dunia yang menyebutkan nilai jasa ekosistemnya hingga USD 15 ribu/ha/tahun.

Lebih jauh Sophie memaparkan potensi *carbon trading* yang disebut sebagai *co-benefit*. Misalnya saja, tiap perusahaan dan perseorangan bisa melakukan *off-set* emisi gas rumah kacanya dengan mendanai upaya konservasi maupun pengelolaan ekosistem Karbon Biru. Organisasi yang berperan dalam upaya ini akan diberikan sertifikasi juga dan bisa menentukan jumlah kontribusi karbonnya.

"Tahun 2021 di Cina, mereka melakukan restorasi mangrovenya menghasilkan karbon yang baik dan sudah tersertifikasi, sehingga kini bisa mendanai pengelolaan dan meningkatkan ekonominya dengan pendanaan ini, yang dulunya dilakukan dengan hibah," jelasnya.

Namun menurutnya, program ini tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, terlebih menyangkut ekosistem yang berbeda, dan diperlukan studi lanjutan yang komprehensif, sehingga upaya ini juga bisa memastikan keuntungannya bagi masyarakat lokal. Namun dia yakin untuk Indonesia akan berjalan baik, jika semua pihak yang terlibat mau berkoloborasi dan berkomitmen untuk upaya yang baik ini.

Sementara dari Australia diceritakan pengalaman dalam mengembangkan kebijakan konservasi laut oleh *Counsellor Development Effectiveness and Sustainability*, DFAT, Kedutaan Australia di Jakarta, Simon Ernst, yang pemerintahnya bahkan telah berusaha menambahkan

stok karbon dan kebijakan *carbon offset.* Terutama sejak mereka menjadi salah satu negara pertama yang membuat laporan terkait dalam pengelolaa kawasan pesisir meliputi mangrove, rawa, dan padang lamun serta mengembangkan metodologi karbon biru. Mereka bahkan bisa mencapai target pengurangan emisi sekitar 43%, kebijakan ini mencakup karbon yang bisa disimpan di pesisir Australia.

"Upaya ini menggunakan dana dari organisasi atau individu dengan skema sukarela dalam kredit karbon yang bisa dijual pemerintah dan swasta. Saat ini kami sendiri sudah memiliki panduan terkait hal ini yang mungkin bisa diadopsi oleh Indonesia," jelasnya, seraya menjelaskan masih ada beberapa tantangannya juga.

Sementara itu pengalaman Amerika Serikat, sejak ada kebijakan khusus tentang Perubahan Iklim dari Presiden Joe Biden, semua UU terkait investasi dan infrastruktur, harus berbasis pengurangan emisi karbon. Bahkan Biden mendorong berbagai proyek konservasi pesisir, riset ilmiah tentang area terbuka dan solusi berbasis alam.

"Presiden juga memberikan perintah (2022) agar bisa dicarikan solusi pendanaan misalnya dari swasta dan berbagai pihak, karena pemerintah tidak bisa melakukan pendanaan untuk hal ini secara keseluruhan," demikian dijelaskan Prof Shaw K.Chen, Peneliti University of Rhode Island, yang juga menjadi pembicara di kegiatan yang diinisiasi oleh ICCTF ini.

Lebih jauh Prof Shaw juga memberikan contoh-contoh kebijakan yang pro-krisis perubahan iklim seperti yang dilakukan Parlemen Amerika yang mendorong adanya perlindungan ekosistem karbon biru demi melindungi planet biru, bumi. Sebut saja Gubernur California, Gavin Newsom, yang pada tahun 2020 telah menandatangani kebijakan yang menargetkan konservasi pesisir sedikitnya 30% hingga 2030. Bahkan Komisi Perubahan Iklim Oregon mengadopsi proposal potensi hutan, lahan basah, dan pertanian untuk pengurangan gas rumah kaca pada tahun 2021. Ada juga kebijakan pendanaan berdasar pasar di 11 negara bagian memiliki *Regional Greenhouse Gas Initiative* (RGGI). Kendati demikian Amerika Serikat sendiri kini tengah mengalami ancaman kehilangan lahan basah dan pesisir karena banyaknya proyek yang menyalahi kelayakan lingkungan.

Salah satu kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Nusa Penida, Bali, kini sudah berjalan dengan tuntas, dan diharapkan beberapa bulan ke depan bisa tumbuh dan mendatangkan ikan-ikan yang cantik (Foto: Dok/ICCTF)

Progres Pembangunan Infrastruktur dan Program COREMAP-CTI ADB

Jakarta, Juli 2022- *Coral Reef Management Program- Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI), yang didukung penuh oleh ADB (*Asian Development Bank*) dipastikan diperpanjang hingga tahun 2023, namun untuk pembangunan infrastruktur dan programnya harus dipastikan selesai hingga akhir tahun 2022. Demikian hasil bahasan dalam *Wrap up Mid-Term Review (MTR*) program yang di lakukan di Jakarta, pada 20 Juli 2022 secara hybrid. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan ADB, Bappenas, ICCTF, dan mitra pelaksana program di site proyek di Nusa Dua, Bali, dan juga Lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat).

Dalam diskusi ini juga telah diusulkan untuk diperpanjang hingga Agustus 2023 hanya sebatas pada kegiatan: Peningkatan Kapasitas (*overseas short term training; Penyusunan Exit Strategy; Project Expose;* Serah Terima Aset; dan Penyusunan *Project Completion Report*). Sementara disisa tahun 2022 diharapkan semua pembangunan infrastruktur dan program harus diselesaikan.

"Kita semua harus memastikan melalui perpanjangan ini dapat mencapai output yang optimal" jelas Helena Lawira, Senior Officer Project ADB Indonesia yang mengawal COREMAP-CTI ADB ini.

ICCTF (*Indonesia Climate Change Trust Fund),* yang diberikan amanah mengawal terlaksananya program ini kepada para mitranya akan lebih ketat memastikan semua sisa kegiatan yang harus berjalan tepat pada waktunya. Leonas Chatim sebagai *Project Leader* COREMAP-ADB ICCTF menjelaskan saat ini semua pembangunan infrastruktur mulai dipercepat dengan pendampingan dan selalu dipantau perkembangannya, sehingga bisa selesai pada waktunya dengan baik. Terutama pembangunan tiga Pusat Informasi Ekowisata (Nusa Penida (Bali), Gili Balu dan Gili Marta, NTB, pembangunan jalur mangrove di Nusa Dua, dan beberapa kegiatan lainnya.

Pembangunan infrastruktur tersebut di atas menjadi penting guna mendukung rehabilitasi pesisir. Misalnya saja pembangunan jalur mangrove yang kelak akan

digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan juga bisa dijadikan pusat ekowisata yang dikelola masyarakat setempat.

"Khusus mangrove, *degraded* luasnya 8.000 meter persegi, CTC sendiri sudah menanam 20,000 ribu bibit. Sementara Degraded terumbu karang masih *on progress,* dan akan lengkap selesai di akhir Agustus ini. Masih *on the track*," jelas Leonas tentang berbagai perkembangan sisa implementasi program dalam diskusi tersebut.

Sementara Direktur ICCTF, Tonny Wagey juga mengingatkan terkait *Grand Package* 7, tentang Kajian Tuna, Kakap dan Rumput Laut, terutama yang menyangkut untuk peningkatan ekonomi komunitas nelayan yang paling diharapkan adalah hasil kajiannya dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan di KKP.

Bappenas sendiri, seperti yang dituturkan oleh Setyawati, Koordinator Perikanan PPN/Bappenas akan memastikan semua dokumen amandemen perpanjangan program dengan para mitra pelaksana bisa segera diproses.

"Kami juga akan Kami juga melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Internal Bappenas terkait perpanjangan ini. Kementerian Keuangan dan Internal Bappenas terkait perpanjangan ini. Kita semua harus berkomitmen untuk menyelesaikan program ini sesuai dengan waktunya. Setidaknya di sisa tahun ini, semua sisa kegiatan bisa dituntaskan dengan baik," jelasnya.

Memacu penyelesaian kegiatan tersisa

Saat ini mitra pelaksana tengah mengejar pembangunan infrastruktur untuk dua pos pengawasan yang ada di Nusa Penida, Bali, dan Gili Matra, NTB. Ada juga dua pembangunan Menara Pengawas di Gili Baru, NTB. Termasuk pembangunan Jalur Trek Mangrove dan Menara Pandang di Nusa Penida, Bali. Semua pembangunan ini akan dilakukan pada Oktober 2022. Sementara secara keseluruhan proyek ini telah memberikan target 28,5% menyertakan elemen gender terutama keterlibatan atau partisipasi perempuan dan inklusif dalam kegiatan konservasi COREMAP-CTI ini, dari target 30% yang ingin dicapai.

Caption Please..... (Foto: Dok/ICCTF)

Beberapa kajian juga masih tengah berlangsung dalam proses review dan juga diskusi dengan para stakeholder terkait, terutama Tentang Kajian Tuna, Kakap dan Rumput Laut, yang diharapkan bisa memberikan rekomendasi ilmiah untuk bisa digunakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, terutama di kawasan perairan NTT, NTB, dan Bali. Karena kakap dan tuna mempunyai nilai jual yang tinggi dan menjadi tumpuan penghasilan masyarakat nelayan di sana. Sehingga perlu dipikirkan untuk memastikan kebelanjutan keberlangsungan spesies bernilai ekonomi tinggi hingga generasi mendatang pun masih bisa menikmatinya. Selain bisa meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat nelayan terhadap kakap dan tuna. Diharapkan kajian ini bisa menjadi rekomentasi dalam kebijakan KKP di wilayah ini.

Pekerja pembangunan Pondok Informasi, Nusa Penida, Bali yang diharapkan selesai hingga akhir November 2022. (Foto: Dok/ICCTF)

3

Tonny Wagey, Executive Director ICCTF memberikan penjelsasan terkait pengelolaan terumbu karang di Nusa Penida kepada Jiro Tominaga, Country Director ADB Indonesia (Foto: Dok/ICCTF)

Monev COREMAP-CTI ADB:

EVIKA Meningkat dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan PIE di Nusa Dua, Bali

Nusa Penida, Bali - *Country Director Asian Development Bank* (ADB), Jiro Tominaga, bersama Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Bappenas, Sri Janti JS, didampingi langsung oleh Tonny Wagey, Direktur Eksekutif *Indonesia Climate Change Trust Fund* - (ICCTF) serta Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, melakukan monitoring dan evaluasi COREMAP-CTI ADB, langsung ke site program di Nusa Lembongan dan Nusa Penida, Bali, pada 9 Agustus 2022.

Dalam kesempatan ini mereka melihat langsung praktik rehabilitasi mangrove seluas 4 Ha , dan upaya sekolompok masyarakat yang didominasi anak muda yang melakukan transplantasi terumbu karang seluas 27,420 m2. Jiro dan Yanti pun sempat mengunjungi UPTD Konservasi Perairan Nusa Penida dan berdiskusi dengan para mitra serta penerima manfaat yang telah merasakan hasil dari peningkatan kapasitas pengolahan rumput laut.

Di pandu oleh Tonny Wagey, Jiro dan Yanti sempat melihat hasil pengolahan rumput laut menjadi produk sabun cuci, bahkan kerupuk. Mereka juga berdisksui dengan para kelompok masyarakat setempat yang telah mendapatkan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi aneka produk yang layak jual bahkan diminati masyarakat. Kelompok *Good Stoy Farm* yang dimotori langsung oleh I Nyoman Sudiatmika, menceritakan merasa bersyukur bisa dilibatkan dalam pelatihan pengembangan rumput laut menjadi bahan produksi sabun ini.

Karena setelah dia praktikan teryata diminati konsumen rumah tangga. Bahkan toko-toko di sekitar Nusa Penida pun mau menerimanya. Dia bisa memproduksi sabun cuci ini bersama kelompoknya 100 liter per hari yang dijualnya sebesar Rp 15,000/ botol. Dia juga membuat kemasan botol untuk bisa dijual di hotel-hotel sekitar Nusa Penida yang juga merupakan salah satu tujuan wisatawan asing dan domistik.

I Nyoman Sudiatmika bersama istri memperlihatkan produk rumput laut yang sedang aktif dipasarkan secara lokal dan juga online. (Foto: Dok/ICCTF)

Sudiatmika pun berani membeli bahan mentah rumput laut sebagai bahan dasar pembuat sabunnya kepada petani dengan harga yang cukup tinggi dari yang di jual tengkulak. Kini usahanya makin berkembang, bahkan akan mengembangkannya hingga pembuatan sedotan dari rumput laut, sehingga bisa mengurangi sampah plastik.

COREMAP-CTI berkontirbusi terhadap peningkatan EVIKA

Hal menarik lainnya dalam kunjungan Monev COREMAP- CTI ADB adalah ketika Kepala UPTD KKP Nusa Penida, Nengah Sugiharta, meyebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi terumbu karang, penanaman bibit mangrove, pendampingan kelompok rumput laut ternyata bisa meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Nusa Penida dan meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan (EVIKA). Berdasarkan penilaian score EVIKA tahun 2022, KKP Nusa Penida menempati status pengelolaan optimum (72,10) dengan total score 1870. Peningkatannya cukup signifikan jika dibandingkan EVIKA tahun 2021 saat program ini mulai dirintis dengan nilai optimum 62,7%. Peningkatan EVIKA juga terjadi di kawasan site COREMAP-CTI ADB lainya seperti di Gili Mtra, NTB, yang pada tahun 2021 hanya mempunyai angka optimum 64, 19 kini menimgkat hingga 82,06 persen. Gili Balu nilai EVIKA 2021 sebesar 40,03 dan di tahun 2022.

Saat mengunjungi kantor UPTD KKP Nusa Penida, Bali, Jiro dan Yanti pun mendapatkan kesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Pusat Informasi Ekowisata (PIE) Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, sebagai penanda dimulainya proses pembangunan tersebut. Diharapkan bangunan ini bisa terbangun kokoh pada tiga bulan berikutnya, dan menjadi pusat informasi dan edukasi yang baik bagi para turis yang akan mengunjungi Nusa Penida.

Sebagai informasi tambahan saja bahwa Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan bagian dari kawasan segitiga terumbu karang dunia, juga mempunyai potensi menyimpan karbon yang cukup bernilai. Apalagi masih ada hutan mangrove tersisa seluas 230 hektar di Nusa Lembongan.

Nusa Penida Bagian dari Gugusan Segi Tiga Terumbu Karang Yang Perlu Dilindungi

"Karena itu kami menempatkan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI)/ Program Pengelolaan Rehabilitasi Terumbu Karang – Prakarsa Segi Tiga Terumbu Karang, untuk rehabilitasi dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan berbasis masyarakat, di sini. Tepatnya di Nusa Lembongan. Masyarakat setempat kini bisa kembali menjadikan mangrove bukan hanya menjaga mereka dari gelombang tinggi, tsunami, tapi juga bisa mengelolanya menjadi tempat wisata berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal menjaga keberlangsungan hidup ekosistem Karbon Biru (*Blue Carbon*), dan sekaligus bisa meningkatkan perekonomian mereka," jelas Sri Yanti, ketika melakukan monitoring dan evaluasi program ini.

Jiro Tominaga bersama Setyawaty melakukan ujicoba pembuatan transplantasi karang di Nusa Penida, Bali (Foto: Dok/ICCTF)

Mangrove di Nusa Penida memiliki potensi stok karbon mencapai 14,929 ton, dengan nilai CO_2 (ekuivalen) sebesar 45.792, 22 ton CO_2 (ekuivalen) (Kusumaningtyas, et.al., 2014). Potensi ini harus dijaga sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Pemanfaatan berkelanjutan yang dikembangkan oleh COREMAP-CTI bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.

Program COREMAP-CTI ADB di Nusa Penida ini adalah salah satu dari bagian *site pilot project* selain di NTB (Gili Matra dan Gili Balu). Kawasan ini bagian dari kawasan perlindungan laut di Lesser Sunda yang memiliki keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi,. Bentang laut (*seascape*) lesser sunda meliputi tiga provinsi di Indonesia dan merupakan jalur migrasi keluarga mamalia laut *(Cetatceans)*, dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Karena itu sangat penting melindungi area ini.

Dalam program COREMAP-CTI yang masih berlangsung ini bukan hanya fokus pada rehabilitasi mangrove semata, namun juga pengelolaan terumbu karang, menerapkan pengembangan perlindungan bagi area kawasan dengan SOP yang jelas, dan pengembangan kapasitas kepada masyarakat setempat dalam meningkatkan mata pencaharian dengan mengelola hasil laut, dan wisata yang berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai kawasan konservasi perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/2014. kawasan ini juga masuk dalam segitiga terumbu karang dunia yang menjadi prioritas upaya pelestarian terumbu karang. Di perairan Nusa Penida terdapat ikan Mola mola *(Sunfish*) yang menjadi ikon bawah laut Nusa Penida, bahkan pulau Bali. Karena itu COREMAP-CTI dikembangkan di kawasan ini dengan harapan bisa meningkatkan kelestarian dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini didukung penuh oleh Bappenas dan ADB.

Tim pemasangan Tagging Penyu di Gili Matra (Foto: Dok/ICCTF)

Tagging Penyu di Gili Matra Demi Keberlangsungan Hidup dan Habitat Penyu

Gili Matra, Lombok, NTT – Gili Matra, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah sangat dikenal sebagai tempat wisata populer yang diminati turis mancanegara dan domistik karena keindahan alam dan pantainya. Termasuk keindahan ekosistem terumbu karang serta keanekaragaman hayati lautnya. Salah satu teruniknya di kawasan ini adalah adanya fauna laut kharismatik yang dilindungi seperti hiu dan penyu.

Program COREMAP-CTI ADB (*Coral Reef Management Program- Coral Reef Triangle Asia Development Bank),* hadir untuk memastikan keanekaragaman hayati wilayah ini terjaga dan leatari, masyarakat pesisirnya pun - sebagai garda terdepan pesisir- bisa diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan ini.

Terkhususnya untuk penyu, COREMAP-CTI mencoba memastikan perlindungan keberadaannya di tengah kondisi yang rentan atau mengalami tekanan antropogenik dan juga alam yang kuat sehingga dapat menimbulkan kepunahan (Di Bello *et al.,* 2015). Selain itu juga, minimnya informasi saintifik tentang suatu kondisi populasi penyu di suatu wilayah perairan tertentu juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Hal ini dapat mengakibatkan upaya konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil optimal.

Dalam survei yang dilakukan di kawasan TWP Gili Marta selama tiga tahun terakhir ini ditemukan ada sekitar 140 penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan 60 penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan beberapa individu penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) (Saputra, 2020). Spesies penyu tersebut tergolong dalam spesies dengan status *decreasing* (IUCN, 2004). Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui status terbaru sebagai bahan laporan peningkatan dua *spesies National Plan of*

Action (NPOA). Hal ini juga diperlukan khususnya untuk menjaga keberadaan spesies ini dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dikarenakan fungsinya yang sangat vital.

"Dari hasil beberapa audiensi dengan stakeholder terkait ternyata belum banyak kegiatan monitoring berkelanjutan terhadap dinamika populasi penyu di kawasan ini. Kegiatan ini masih dilakukan temporer. Selain itu juga keterbatasan data pendukung seperti referensi ilmiah juga belum mencukupi. Karena itu penting memastikan status dan dinamika populasi penyu sehingga kita bisa merekomendasikan agar keberadaan penyu yang makin berkurang jumlahnya ini bisa dijaga, dan keberlangsungan hidup dan habitat hidupnya juga bisa lestari," jelas *Project Team Leader* COREMAP-CTI, Leonas Chatim.

Apalagi penyu di sini, tambah Leonas lagi, juga menjadi daya tarik objek wisata utama yang sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara serta mendatangkan pemasukan (*income*) yang menjanjikan bagi pelaku usaha penyelaman penyu.

Pentingnya *tagging* penyu

Leonas menambahkan guna bisa memastikan dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemangku kebijakan dalam mengatur tata kelola konservasi TWP Gili Matra ini, COREMAP-CTI ADB melakukan survei penyu yang telah selesai dilakukan pada Juli 2022. Tim Survei ini pun memasang *satelite telemetry tak* kepada beberapa penyu sejak 2 -24 Agustus 2022, dengan melibatkan masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tim penyelam profesional, dan dokter hewan di Gili Matra. Ada dua *tagging* telemetri yang sudah dipasang pada dua penyu yaitu satu penyu hijau betina dengan panjang lebih dari 80 cm, dan satu penyu sisik betina dengan panjang lebih dari 70 cm. *Tagging* ini sudah dipastikan aman, dan juga mengedepankan *animal welfare*, dan diawasi langsung oleh dokter hewan yang profesional.

"Untuk di Gili Marta, survei dan *tagging* untuk penyu adalah pertama kali. Bahkan hal yang sangat baru

Salah seorang penyiem mengukur lebar karapan penyu untuk selanjutnya dipasangkan tagging (Foto: Dok/ICCTF)

dilakukan. Studi ekologi penyu adalah hal yang penting dilakukan karena ketika kita ingin melakukan konservasi hewan kharismatik ini tentunya kita harus mempunyai data saintifik yang baik untuk membuat suatu strategi konservasi yang baik," jelas Muhammad Soimin, *Marine Biologist turtle specialist*, yang ikut dalam Tim Survei Penyu Gili Matra ini.

Dengan *tagging* ini diharapkan bisa mengestimasi secara akurat kepadatan populasi spasial dan temporal penyu yang bersarang (*nesting females*) di sepanjang pantai wilayah pendaratan penyu bersarang (*nesting sites*). Kondisi ini juga menjadi catatan penting karena beberapa pantai yang menjadi tempat sarang penyu juga berdekatan dengan bangunan hotel, atau kegiatan wisatawan.

Tagging juga bisa mengestimasi struktur populasi penyu dalam skala spasial dan temporal (*male – female ratio, female age at maturity*); Megidentifikasi *breeding spots*, *nesting sites*, *Feeding ground*, dan mobilitas penyu; *Lesson learned and best practices* – Inisiasi penerapan metode standar (*standardized methodology*) untuk kegiatan monitoring dan konservasi penyu sehingga diperoleh data yang dapat digunakan secara berkelanjutan; *Post program recommendation* – Rekomendasi strategi optimlisasi konservasi penyu untuk meminimalisir dampak faktor-faktor alam dan antropogenik.

5

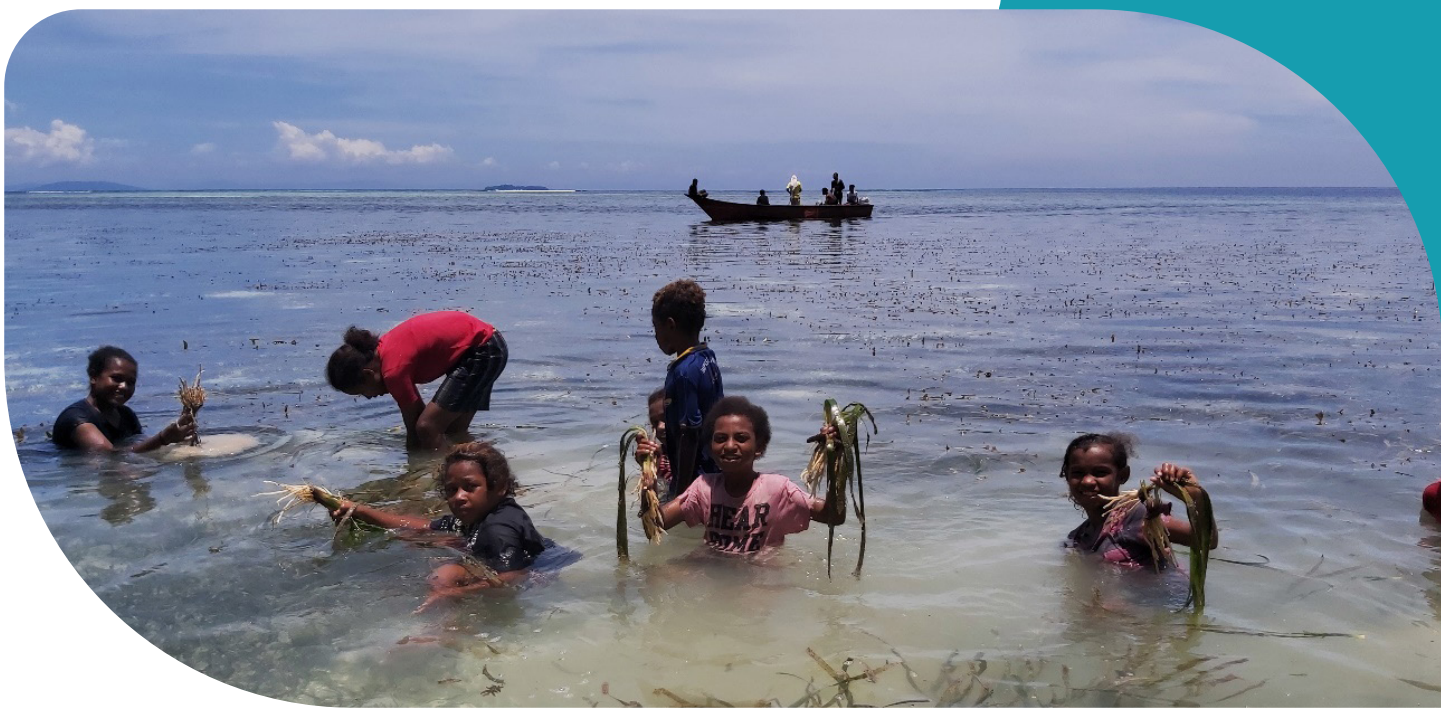

Para remaja puteri di Yensawai Barat, Raja Ampat, Papua Barat, ikut membantu dalam pengelolaan rehabilitasi lamun di wilayah tempat mereka tinggal. Kegiatan ini dana yang baik untuk bisa memastikan kegiatan pembangunan ekonomi biru(Foto: Dok/ICCTF)

Technical Workshop: Blue Finance Strategy

Bappenas Mendorong Pendanaan Biru untuk Memperkuat Pembangunan Ekonomi Biru

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong adanya pendanaan inovatif *Blue Financing* (Pendanaan Biru*)* untuk pengembangan pembangunan *Blue Economy* (Ekonomi Biru*)* di Indonesia. Untuk pendanaan 7 agenda pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan pendanaan sebesar USD 1.641,3 milyar, sedangkan APBN hanya mampu mendanai 20-25% dari kebutuhan tersebut, termasuk untuk sektor kemaritiman perikanan dan kelautan. Pendanaan inovatif *blue financing* ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang berkontribusi untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang ada.

Demikian diungkapkan oleh Vivi Yulaswati, PLT Deputi Bidang Kemaritiman Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, saat memberikan paparan pembuka pada *Technical Workshop Blue Finance Strategy* di Jakarta, 14 September 2022. Kegiatan ini didukung penuh Bank Dunia, bekerjasama dengan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)- Bappenas.

"Dari sisi inovasi pendanaan, Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan instrument *Green Bond*/Sukuk yang mencapai USD 3.5 Milyar dan Rp 5.4 triliun serta *SDGs Bond* yang mencapai EUR 500 juta. Namun, pendanaan inovatif ini masih belum mencukupi pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangan pendanaan tersebut maka saat ini Kementerian PPN/Bappenas memiliki inisiatif mengembangkan *Blue Bond*/Sukuk yang nilainya akan diidentifikasi dari kebutuhan pembangunan di sektor kelautan kedepan." Jelasnya.

Ditambahkannya, sejauh ini Bappenas telah menyusun kebijakan utama yaitu *Blue Economy Development Framework* dan *SDGs Security Framework* yang kemudian diterjemahkan dalam strategi berbentuk *Blue Finance Policy Note* melalui dukungan *World Bank* yang

Mangrove dipercaya sejumlah ahli bisa menyerap karbon lebih tinggi dibandingkan hutan teresterial. Di Indonesia keberadaannya juga terancam, dibutuhkan pendanaan yang besar dalam upaya menyelamatkan hutan mangrove di Indonesia.(Foto: Dok/ICCTF)

diharapkan bisa menjadi salah satu dasar kebijakan pendanaan biru di Indonesia sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Vivi juga mengharapkan dengan adanya workshop tersebut bisa menyelaraskan pemahaman antar sektor baik di pemerintahan maupun stakeholder lainnya tentang *Blue Financing* terkait peluang pendanaan dan pembiayaan dari sumber pemerintah dan swasta. Termasuk memetakan peran dan program para pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program *Blue Financing* di Indonesia. Kajian *Policy Note Blue Finance* yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama *World Bank* juga bisatersosialisasikan.

Sedangkan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Sri Yanti JS dalam sambutan penutupan workshop ini berharap implementasi dari *Blue Finance* ini bisa segera terlaksana dan dapat didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Kami berharap setelah *technical workshop* ada tindak lanjut berupa workshop nasional untuk bisa lebih menentukan langkah yang lebih konkret dan strategis untuk implementasi dan pengembangan Pendanaan Biru di Indonesia. Harus ada dokumen *Blue Finance Instrument Guideline* sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai panduannya," tandas Yanti.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Swasta, dan NGO.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi antara lain, Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan yang menjelaskan terkait Pembiayaan Pembangunan melalui Skema Utang Negara (SUN) dan mekanisme penerbitan SUN. Dilanjutkan paparan Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan yang menjelaskan terkait Sukuk dan beberapa proyek yang didanai oleh Sukuk. Lalu ada paparan Perencana Ahli Utama Kedeputian KSDA Bappenas yang menyampaikan Pedoman Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru. SDGs Secretariat Indonesia juga ikut memaparkan terkait *SDGs Securities Framework.*

Rangkuman diskusi kegiatan ini antara lain disebutkan, implementasi *Blue Finance* diharapkan bisa segera terlaksana dan dapat didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Pendanaan inovatif sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor biru, karena itu Kementerian PPN/Bappenas memiliki inisiatif mengembangkan *Blue Bond*/Sukuk yang nilainya akan diidentifikasi dari kebutuhan pembangunan di sektor kelautan ke depan. Selain itu kajian *Policy Note Blue Finance y*ang telah disusun oleh KementerianPPN/ Bappenas bersama *World Bank* diharapkan bisa tersosialisasikan. Lebih dari iru diperlukan adanya dokumen *Blue Finance Instrument Guideline* sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai panduan.

6

Kegiatan Wisuda Mahasiswa Program Master Degree. (Foto:Dok/ICCTF)

Para *Master Degree* "Sumbang Pikiran" untuk Pengelolaan Konservasi Laut Gili Matra

Lombok – Sebanyak empat pelajar yang mendapatkan beasiswa penuh dari program *Master Degree* yang dibiayai Kementerian PPN/ Bappenas- ICCTF, dan telah dinyatakan lulus pada 12 Juli 2022, dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia, mempresentasikan hasil penelitian mereka pada kegiatan Diseminasi Program Master Degree IPB pada 16 September, di Mataram, NTB. Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Kelautan dan Perikanan, Sri Yanti, JS, dan Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey.

Keempat mahasiswa: Amrullah Rosadi (ICCTF), Ratu Fatia Rahmadyani (Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas), Urai Ridho AMF Banarsyadhimi, dan Zakiyah Khairunnia (keduanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan). Mereka dinyatakan lulus dalam seleksi penerima beasiswa Master Program, Proyek COREMAP CTI hibah ADB.

Sebelumnya pada 10-15 Juli, para penerima beasiswa *Master Degree*, juga sempat dikunjungi, dipantau dan evaluasi langsung di Australia oleh Perencana Ahli Utama Bidang Kemaritiman dan Kelautan Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, Direktur Lingkungan Hidup Ir. Medrilzam, M. Prof.Econ, PhD, Prof. Fredinan Yulianda, dan Dr. Majariana Krisanti, staf PIU ICCTF, Alya Prima. Mereka semua juga menghadiri wisuda dari keempat mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022, di Australia.

Dalam kegiatan Diseminasi tersebut, Amirullah Rosadi memaparkan hasil risetnya berjudul, "Memahami kawasan konservasi perairan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat – Studi kasus Gili Matra, Indonesia." Kesimpulan penelitiannya adalah pemetaan pemangku kepentingan dapat membedakan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh kepada pengelolaan MPA, Mental model membantu

Sri Yanti JS, dan Tonny Wagey ketika membuka Dissemination Workshop. (Foto:Dok/ICCTF)

merumuskan perbedaan perspektif tentang pengaruh kawasan konservasi terhadap kesejahteraan Masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat lokal pun menjadi dasar perbedaan utama perspektif pemangku kepentingan.

Dia pun merekomendasikan bahwa menyeimbangkan pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up* menjadi penting; Pendekatan *Co-Management* bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan; Memberikan distribusi dan pengaruh kepada pemangku kepentingan yang lain juga akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat; Sebaiknya juga dilakukan penelitian mendalam lebih lanjut.

Sementara Zakiyah Khairunnisa, memaparkan hasil penelitiannya berjudul Analisis jejak karbon dari pariwisata pesisir." Dalam kesimpulan penelitiannya disebutkan kandungan CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata sebesar 65.965 tCO2/tahun, sedangkan penyerapan CO2 sebesar 8.975 TCO2/tahun. Artinya perlu dikembangkan bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang rendah emisi karbonnya

Dia pun merekomendasikan agar bisa lebih mengestimasi pariwisata yang lebih akurat, sebaiknya juga melibatkan komunitas Gili Matra terkait; Estimasi potensi penyerapan karbon yang lebih akurat dengan pengolahan data studi tahunan oleh BKKPN dengan pemetaan, pengembangan model sistem dinamik yang lebih baik, memasukan unsur daya tarik Gili Matra dan gangguan pariwisata terhadap ekosistem pesisir, simulasi skenario yang lebih optimum.

Sedangkan Ratu Fatia Rahmadyani dalam paparan berjudul, "*Assesment of Stekholders Perception of Value of Coral Reef Ecosystem Services (ES): the case of Gili Matra Marine Tourism Park*," menyimpulkan teridentifikasikannya 8 jasa ekosistem terumbu karang Gili Matra. Lima diantaranya merupakan jasa ekosistem kunci (*high critical and high priority*) yakni pariwisata perairan, perikanan tangkap, pariwisata pantai, perlindungan habitat, dan stabilisator pesisir. Pemetaan spasial ES juga mengidentifikasikan lokasi supply (*source sink*) dan demand (aktivitas pemanfaatan). Selain itu berdasarkan visualisasi spasial ada asumsi ketidak sesuaian antara *supply-demand spot*, dan *overlap* antara jasa ekosistem yang dapat diartikan sebagai tekanan, serta penerapan sistem batas yang lebih cermat berdasarkan identifikasi spasial ES.

Dia juga menyebutkan, konseptual diagram aliran jasa ekosistem menunjukan *positive feedback loop*, dimana sebuah trigger awal termagnifikasi dalam *cascade flow*, sehingga menggeser suatu kondisi dari baseline awalnya, mengancam eksistemsi jasa-jasa yang merupakan penunjang fungsi ekologis ekosistem.

Ratu pun merekomendasikan agar pemahaman umum tentang eksosistem menjadi dasar pertimbangan dimana investasi pengelolaan dapat dikonsentrasikan untuk menghasilkan manfaat maksimal, tanpa mengabaikan potensi *trade-off*; Konfigurasi *ES flow* dapat diperdalam melalui studi dinamik sistem dimana faktor valuasi SDA diintegrasikan; Luasan jenis ES yang diidentifikasi harus diimbangkan dengan sistem tata Kelola yang seimbang melalui sistem delegasi dan memperkuat skema *co-management*.

Foto Bersama setelah Kegiatan Diseminasi. (Foto:Dok/ICCTF)

Lain halnya Urai Ridho yang mempresentasikan hasil penelitiannya berjudul, "Penilaian dampak wisata bahari dan perlindungan laut terhadap jasa ekosistem budaya menggunakan pendekatan hedonis dan *eudaemonis* terpadu: studi kasus kepulauan Gili Matra." Dalam hal ini kesimpulan penelitiannya adalah, di tiga pulau Gili Matra , harga rumah yang lebih tinggi ditemukan di dekat garis pantai, titik wisata pantai, dan garis pantai dengan *sunset view*. Ketika dijelajahi secara terpisah, setiap pulau menunjukkan karakteristik tertentu. Penduduk Kepulauan Gili Matra merasakan manfaat CES yang signifikan dari lingkungan pesisir dan pulau di sekitarnya. Semua dimensi kesejahteraan yang dialami oleh penduduk Kepulauan Gili Matra menunjukkan hubungan yang signifikan dengan beberapa fitur wisata bahari dan konservasi.

Rombongan Studi Trip ketika diterima otoritas Mercabarna. (Foto: Dok/ICCTF)

Study Trip ke Spanyol untuk Melihat Tata Kelola Perikanan Kakap dan Tuna

Spanyol- Pada 1-4 Juli 2022, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti JS, Bappenas; Perencana Ahli Utama Kelautan dan Perikanan Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey, serta perwakilan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara melakukan *study trip* ke Spanyol guna melihat tata kelola rantai pasokan dan sertifikasi Internasional kedua spesies bernilai jual tinggi ini.

Knowledge exchange ke Spanyol ini adalah untuk mendukung program peningkatan perikanan khususnya tuna dan kakap di Indonesia. Dalam hal ini yang dilihat adalah bagaimana Spanyol memproses sertifikasi dan pemanfaatan sumber daya perikaannya secara bertanggung jawab dengan memastikan praktik yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Kegiatan ini menjadi penting mengingat import produk perikanan di Spanyol terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi peluang bagi pasar perdagangan produk perikanan dari Indonesia. Dalam *study trip* ini diketahui bahwa memperdagangkan produk perikanan di Spanyol ada kaidah keberlanjutan yang harus diperhatikan oleh pengusaha perikanan di Indonesia. Kaidah keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya terkait stok saja, tetapi juga harus memperhatikan kaidah sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Dari hasil diskusi dengan berbagai otoritas perikanan di Spanyol disebutkan jika pengusaha perikanan Indonesia ingin memasuki pasar internasional maka yang harus diperhatikan adalah menjaga rantai dingin perikanan sejak ikan ditangkap untuk mencegah perkembangan histamine dan bakteri merusak lainnya;

Ketelusuran ikan harus dilaksanakan untuk tidak hanya keberlanjutan stok, tapi juga untuk menghindari *mis-labeling*; Sertifikat HACCP harus dimiliki oleh perusahaan perikanan; Kaidah keberlanjutan sosial – ekonomi mulai harus dipertimbangkan oleh pengusaha perikanan di Indonesia, mengingat hal ini sudah mulai diimplementasikan oleh perusahaan perikanan di Spanyol.

Selain itu para pengusaha perikanan di Indonesia juga harus memperhatikan masalah kuota, karena hanya bisa diajukan setiap dua tahun sekali. Jika ada satu perusahaan di Indonesia ingin menambah volume ekspor atau ada perusahaan baru yang ingin mengekspor ikan ke Spanyol, maka perlu ada diskusi dengan perusahaan pengimpor dari Spanyol terkait kuota. Karena itu pemerintah perlu memfasilitasi kerjasama dengan Spanyol, mengingat sudah ada tawaran dukungan baik dari Mercabarna, Conxemar, Pelabuhan Perikanan Vigo, dan Anfaco untuk memberikan bantuan teknis ke Indonesia.

Dalam kegiatan ini, rombongan *study trip* juga mengunjungi Pasar Ikan di Mercabarna, melihat langsung bagaimana sistem dan tata kelola kegiatan pelelangan ikan antara penjual dan pembeli. Proses ini tercatat dalam digital sistem, sehingga yang tidak terdaftar dalam sistem tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pelelangan juga mencatat semua produk perikanan yang dijual maupun dilelang, dan tangkapan asalnya serta data lengkap jenis ikannya (apakah termasuk yang boleh ditangkap atau tidaknya). Dalam kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat pelelangan juga menjadi perhatian utama pihak pengelola, dimana sampah dan buangan potongan ikan yang tercecer pun tidak diperkenankan terlihat. Jika ada pelanggaran, maka akan diberikan sangsi tegas bahkan sampai pada pencabutan izin usaha.

Semua ikan yang telah dilelang atau terjual diangkut dalam kontainer besar dengan mesin atau kereta hidrolik. Sumber daya manusia di sini sangat minim. Namun yang jelas, semua keamanan mutu produk perikanan menjadi perhatian utama. Bahkan disediakan fasilitas lab untuk hasil uji mutu ikan untuk mencegah berkembangnya bakteri dan parasit.

Perencana Ahli Utama Kelautan dan Perikanan Bappenas, Galdwin Yusuf, berdiskusi dengan pengurus dan penglola Pusat Pasar Ikan Mercabarna. (Foto: Dok/ICCTF)

Dalam kesempatan tersebut rombongan trip juga sempat melakukan diskusi dengan *Director of Marketing and Institutional Relations Mercabarna*. dijelaskan bahwa Mercabarna merupakan perusahaan pemerintah (Pemerintah Barcelona, Pemerintah Catalonia, Pemerintah Spanyol), yang mengelola wilayah seluas 90 hektar, dimana di dalamnya terdapat sekitar 700 perusahaan. Hingga saat ini, Mercabarna belum pernah mengimpor Tuna atau ikan dari Indonesia. Terungkap juga dalam diskusi permasalahan utama di Spanyol saat ini adalah jumlah nelayan dan pekerja berkurang karena generasi muda lebih memilih pekerjaan lainnya.

Rombongan juga sempat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan di Vigo. Secara umum perdagangan di pelabuhan perikanan Vigo dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan tingkat pertama dan perdagangan tingkat kedua. Perdagangan tingkat pertama adalah lelang ikan dari kapal kapal besar yang menangkap ikan cukup jauh dan kemudian membongkar ikannya secara langsung di pelabuhan perikanan Vigo. Target perikanan ini antara lain, *Monk Fish*, Hiu, cumi, *pomfret*, dan lain lain. Perdagangan tingkat kedua merupakan perdagangan ikan untuk perikanan pantai dan menggunakan kapal yang relatif kecil. Target perikanan ini antara lain kerapu, octopus, seabream.

Untuk mengatasi masalah hama burung yang cukup mengganggu aktivitas bongkar dan transportasi ikan, pihak pelabuhan melakukan dengan cara biologi/ ekologi dengan menerbangkan burung elang terlatih untuk mengusir burung burung kecil.

Rombongan ketikan berada di Pelabuhan Perikanan Virgo. (Foto: Dok/ICCTF)

Rombongan juga melakukan rapat dan diskusi dengan CONXEMAR yang merupakan asosiasi untuk retailer dan wholesalers, yang telah beranggotakan sebanyak 226 perusahaan. Perusahaan-perusahaan di bawah Conxemar membentuk divisi keberlanjutan dan mengikuti peraturan dari EU. Perusahaan di bawah Conxemar membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan untuk melakukan bisnis, oleh karena itu penting untuk memastikan keberlanjutan stok dan para pelakunya. Bahan baku dari UE (mendarat dengan kapal penangkap ikan bendera EU) hanya mencakup 35%, penting untuk menjaga keberlanjutan di negara ketiga dimana kegiatan import ikan saat ini sedang bertumbuh.

Setelah dari Conxemar mereka pun melakukan diskusi dengan ANFACO, sebuah asosiasi perusahaan pengolahan (pengalengan) ikan tertua di Spanyol yang didirikan pada tahun 1904 yang saat ini beranggotakan 240 perusahaan. Jaminan keamanan pangan dan mis-labeling merupakan isu utama dalam industri ikan olahan/kaleng di sini.

Terakhir yang menarik adalah, terdapat peluang kerjasama, dimana ANFACO memberikan bantuan teknis kepada perusahaan swasta di Indonesia dengan pembiayaan dari pemerintah Kota Vigo atau Pemerintah Regional Galicia.

GALERI

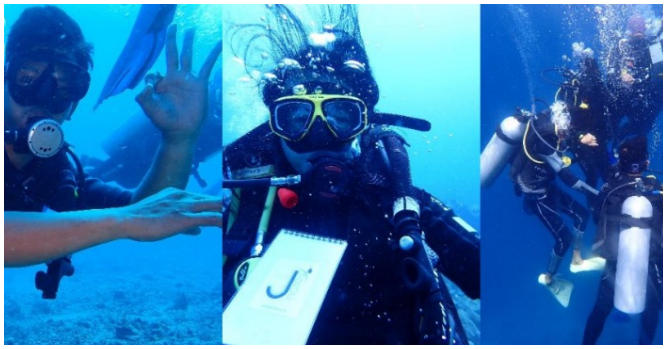

1 Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juli 2022. Kegiatan dilaksanakan oleh DPM *Dive Center* di Gili Trawangan, Lombok, NTB. Setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan selam, didapatkan hasil 15 peserta selam dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat selam dari *Scuba School International* (SSI).

Kegiatan yang sama juga dilakukan di Taliwang dan Kawasan Gili Balu, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa, NTB. Berbagai elemen masyarakat yang akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan berbasis masyarakat dikutsertakan. Teryrama dari empat desa di wilayah Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat yakni Desa Poto Tano, Desa Kiantar, Desa Pasir Putih, dan Desa Tanjung Prapat. Para peserta diberikan materi mendasar menyelam, dan juga melakukan monitoring kondisi terumbu karang.

2 Koordinasi Inisiasi Pembentukan Pokdarwis Gili Balu

Masyarakat Desa Senayan, NTB, dan juga mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB, menginisiasi pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Gili Balu, pada 12 Agustus 2022. Mereka juga mengundanga berbagai elemen masyarakat untuk dilibatkan dalam kepengurusan Pokdarwis. Dalam kegiatan ini terbentuklah kepengurusan Pokdarwis yang dikukuhkan dalam SK Pokdarwis dan disahkan oleh Kepala Desa

3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berbagai peningkatan kapasitas digelar dalam program COREMAP-CTI ADB, terutama di NTB. Misalnya Pelatihan Pengelolaan Homestay, 14-16 September 2022, yang diikutu Pokdarwis, dan Pokmaswas Poto Tano, Tambaksari, dan Senayan, Kiantar. Termasuk Kelompok Nelayan, Penyedia Jasa Wisata (pemilik perahu/kapal wisata), dan masyarakat pemilik penginapan sekitar.

Kapasitas lainnya yang diberikan masyarakat adalah Pelatihan Pariwisata Berkelanjutan pada 26-27 September 2022 di Taliwang.

Terakhir Pelatihan Pembuatan Aneka Suvernir yang diikuti kelompok perempuan di Pato Tano pada 28-29 September 2022.

4 Rehabilitasi terumbu karang di KKP Nusa Penida

Mitra pelaksana COREMAP-CTI ADB, Coral Reef Centre (CTC) mendorong kaum muda di Nusa Penida, Bali, untuk ikut serta dalam melakukan transplantasi terumbu karang dengan metode reef star, guna mendapatkan sertifikasi yang dinilai MARS trainer. Ada delapan orang yang mengikuti test ini.

5 Pelatihan Pengolahan Abon Ikan dan Bakso Ikan

Kelompok perempuan yang tergabung dalam Poklahsar (Kelompok Pengolah Hasil Perikanan), di Dusun Gili Air, dan Waroeng Sakak, Dusun Gili Meneo, dan Gili Indah, NTB, mendapatkan Pelatihan Pengolahan Abon Ikan dan Bakso Ikan, dari program COREMAP-CTI ADB. Kegiatan ini dilakukan pada 4-5 Juli di Dusun Gili Air.

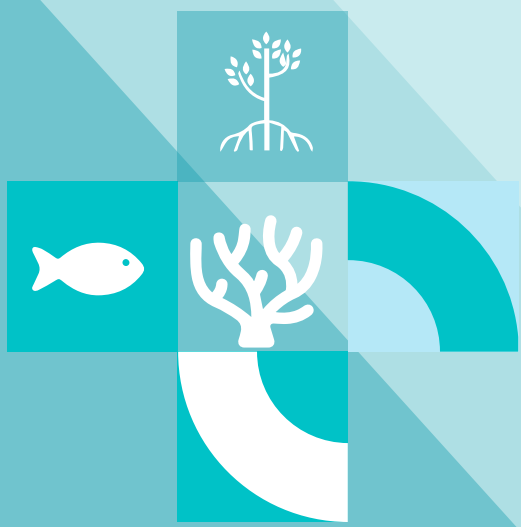

ICCTFNEWS

Supporting the Indonesian Government for a Better Climate

NEWSLETTER TRIWULAN III
Periode Juli – September 2022 **Edisi 35**

Indonesia Climate Change Trust Fund
Lippo Kuningan 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,
Jakarta 12940, Indonesia.
Phone : (+62 21) 80679386 (Hunting)
Fax : (+62 21) 80679387
Email : secretariat@icctf.or.id

Kementerian PPN/ Bappenas

ICCTF Indonesia Climate Change Trust Fund

www.icctf.or.id
Indonesia Climate Change Trust Fund
ICCTFofficial
@ICCTF_ID